

**PEMETAAN BIDANG TANAH**  
**MELALUI SURVEI LAPANGAN DI DESA DAWAN KALER**  
**KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI**

**Oleh**

**Ni Putu Lehni, NIM 2254015011**

**Program Studi Teknologi Rekayasa Penginderaan Jauh (D4)**

**ABSTRAK**

Kebijakan satu akan diterapkan setelah seluruh bidang tanah di Indonesia dipetakan secara menyeluruh. Demi mewujudkan peta lengkap Desa/Kota, diperlukan peraturan yang mendukung pemetaan lengkap bidang tanah melalui proyek pendaftaran tanah sistematis lengkap. Pemetaan ini dilakukan melalui survei lapangan untuk mengumpulkan informasi kepemilikan bidang tanah di Desa tersebut. Tujuan penelitian ini yakni melakukan identifikasi distribusi dan faktor-faktor bidang tanah yang belum tercatat di peta kerja Desa Dawan Kaler serta menjelaskan proses pemetaan bidang tanah untuk registrasi dalam peta kerja. Metode yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa terdapat tiga kategori bidang tanah yang belum terregistrasi, yaitu belum terplotting, belum rapi, dan tumpang tindih. Penyebab utamanya karena pemilik bidang melakukan kesalahan penunjukan batas bidang tanah, bidang tanah yang masih memiliki kasus sengketa hak ahli waris dan kurangnya partisipasi pemilik bidang dalam proses pendaftaran tanah. Sementara petugas ukur kesulitan dalam mengumpulkan data subjek dan objek bidang tanah, kesalahan dalam penggambaran bidang tanah yang posisinya tidak sesuai dan keterbatasan peralatan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan. Untuk itu perlu dilakukan metode survei lapangan untuk mengumpulkan dan mencari informasi mengenai kepemilikan bidang tanah tersebut untuk melengkapi peta kerja yang bidang tanahnya belum terregistrasi.

**Kata-kata kunci:** Pemetaan Bidang Tanah, Metode Survei Lapangan, Peta Kerja.

**LAND PLATE MAPPING**  
**THROUGH A FIELD SURVEY IN DAWAN KALER VILLAGE**  
**KLUNGKUNG DISTRICT, BALI PROVINCE**

**Ni Putu Lehni, NIM 2254015011**

**Remote Sensing Engineering Technology Study Program (D4)**

**ABSTRACT**

The one map policy will be implemented after all land parcels in Indonesia have been thoroughly mapped. To realize complete village/city maps, regulations are needed that support the full mapping of land parcels through a complete systematic land registration project. This mapping was done through a field survey to collect information on land ownership in the village. This research aims to identify the distribution and factors of land plots that have not been recorded on the Dawan Kaler Village work map and explain the process of mapping land plots for registration on the work map. The method applied is descriptive qualitative. The research results indicate that three categories of land plots have not been registered, namely not yet plotted, not neat, and overlapping. The main causes are that plot owners make mistakes in designating land plot boundaries, land plots still have cases of dispute over their rights, and there is a lack of participation by plot owners in the land registration process. Meanwhile, measuring officers had difficulties in collecting data on subjects and objects on land plots, errors in depicting land plots in inappropriate positions, and limited equipment for carrying out measurements and mapping. For this reason, it is necessary to carry out a field survey method to collect and search for information regarding the ownership of the land plot to complete the work map where the land plot has not been registered.

**Key words:** Land Plot Mapping, Field Survey Methods, Work Maps.